

Pemprov Jateng Berpredikat WTP

JAKARTA - Pemerintah memberikan penghargaan kepada Pemprov Jawa Tengah yang menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2012 dengan capaian tertinggi.

Pemprov memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penghargaan juga diberikan kepada Kementerian/ Lembaga (K/L) dan daerah lain.

Penghargaan diserahkan Wakil Presiden Boediono kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2013 bertema "Membangun Sinergi Menuju WTP" di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis (12/9).

Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan terdapat beberapa perbaikan dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan baik di tingkat K/L maupun daerah. Terbukti dari bertambahnya K/L dan daerah yang memperoleh WTP dan semakin sedikit yang memperoleh opini *disclaimer* (tidak memberikan pendapat).

Dia menyebutkan opini BPK untuk Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LK KL) yang mendapat WTP meningkat signifikan menjadi 69 K/L di tahun 2012. Tahun 2006 hanya 7 K/L yang dapat WTP saat LKKL pertama kali diberikannya opini. "Disclaimer sebelumnya 36 tahun 2006 jadi 3," katanya.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapat WTP mengalami kenaikan. Tahun 2012 LKPD yang mendapat WTP mencapai 116 LKPD dari seluruhnya 548 LKPD. Tahun 2009 hanya 21 LKPD yang WTP.

Chatib menjelaskan sebe-

lum tahun 2004 dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, hanya bisa menyajikan satu laporan yang dikenal sebagai laporan perhitungan anggaran negara.

Ganjar Prihatin

"Tahun 2005 pemerintah berhasil menyusun laporan keuangan yang kita kenal sebagai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara," ungkapnya.

Penyusunan LKPP itu dinilai sebagai langkah besar dalam pengelolaan keuangan negara yang menyajikan laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo menyatakan meski memperoleh predikat WTP, masih ada hal yang membuatnya prihatin.

"Sebenarnya dengan WTP pun, saya masih ada keprihatinan beberapa hal. Misalnya sistem penggajian masih manual, belum pakai transfer. Dalam pengelolaan bagus tapi faktanya masih terlalu rumit. Buat saya pada tingkat implementasi mesti kita dorong tidak cukup hanya dengan predikat itu," jelasnya.

Dia menegaskan predikat WTP tersebut harus dipertahankan seraya mendorong kabupaten/kota di Jateng agar bisa memperoleh opini WTP.

Pasalnya, baru tujuh kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP pada LKPD tahun 2012. Angka tersebut hanya bertambah satu dibanding pencapaian LKPD 2011. (J10-79)